

CIRI HURU-HARA : DARI ANTI-TIRANI KE ANARKI

Oleh Sarlito Wirawan Sarwono*)

Pengendalian huru-hara telah menjadi tugas rutin Polri sejak menjelang kampanye Pemilu 1997 sampai sekarang. Tugas itu lebih berat daripada tugas pengendalian huru-hara sebelumnya. Jika sebelumnya Polri hanya menghadapi huru-hara yang spontan (bonek, unjuk rasa pengemudi angkot dsb.), tugas yang terjadi akhir-akhir ini mengandung muatan sosial-politis yang seringkali di luar jangkauan kewenangan Polri.

Di samping itu masih melemahnya koordinasi di dalam tubuh Polri dan ABRI sendiri sering menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas di lapangan.

Dampaknya tidak hanya menurunnya citra Polri, akan tetapi tidak jarang Polri atau anggotanya menjadi sasaran kemarahan massa (anggota dilecehkan, dikeroyok, diisyukan di media massa, bahkan markas atau pos polisi diserbu dan dirusak).

Untuk itu Polri perlu memahami latar belakang perilaku massa akhir-akhir ini (konteks makro) agar Polri bisa mengambil tindakan-tindakan yang tepat dan berdaya guna di samping mengurangi kerugian dan korban yang tidak perlu (konteks mikro).

Jika diamati dengan cermat, ternyata ada berbagai jenis massa yang harus dihadapi Polri sejak kampanye Pemilu 1997 yang lalu. Massa OPP (terutama P3) yang bisa tiba-tiba beringas dan agresif, berbeda dari massa mahasiswa dalam aksi-aksi reformasi damai di dalam kampus. Tetapi massa mahasiswa ini berubah lagi setelah berhentinya presiden Suharto. Ketika massa mahasiswa dari kampus-kampus utama (UI, UGM, ITB) sudah kembali ke kampus masing-masing mahasiswa-mahasiswa dari kampus-kampus papan menengah, bahkan papan bawah justru mulai turun ke jalan. Walaupun atribut mereka mirip dengan massa mahasiswa sebelumnya (berjaket, ikat kepala, yell-yell, bus-bus dan truk-truk) namun perilaku mereka berbeda. Mahasiswa dari kampus papan bawah lebih agresif dan destruktif. Apalagi ketika massa mahasiswa ini digantikan oleh massa lainnya seperti buruh, petani, penganggur, golongan buta huruf dsb. Atribut mereka tetap sama dengan mahasiswa, tetapi perilaku mereka jauh lebih destruktif lagi, tersebar ke daerah-daerah terpencil (yang tidak ada mahasiswanya) dan tidak memilih-milih sasaran (bahkan kantor kepala desa tempat mereka mengurus KTP maupun pabrik tempat mereka sendiri bekerja ikut dibakar).

*) Penulis adalah Guru Besar Fakultas Psikologi UI dan PTIK, Jakarta.

Jika dihubungkan dengan latar belakang makronya, maka akan nampak bahwa perbedaan-perbedaan perilaku yang terjadi pada berbagai huru-hara massal sejak pra-pemilu 1997 ada hubungannya dengan perubahan konstelasi politik sejak saat itu.

Seperti kita ketahui, politik Indonesia diguncang sangat keras oleh krisis moneter yang terjadi sejak Juli 1997. Pada masa itu supra-struktur politik masih sangat dikuasai oleh elite politik yang berpangkal pada presiden Soeharto. Sementara infrastruktur politik masih didominasi oleh Golkar. Semua unsur sosial-politik yang lain harus mengambil posisi pro atau anti pada pusat-pusat kekuasaan ini. Dapat dimengerti bahwa pada saat itu mayoritas masyarakat memilih berpihak pada kekuasaan (termasuk ABRI yang mengambil posisi mendukung Golkar secara terbuka). Suasana yang sudah berlangsung sangat lama (lebih dari 30 tahun) lama-kelamaan menjerumuskan kepada tirani.

Pada masa-masa menjelang pemilu, massa yang mendukung OPP minoritas (terutama P3 dan karena PDI sudah terpecah) mengambil kesempatan untuk berunjuk rasa menentang tirani. Dalam rangka ini maka massa berperilaku agresif dan destruktif terhadap semua yang melambangkan kekuasaan dan keamanan (pemerintah, polisi, pertokoan, etnik Tionghoa, non-Islam dsb.). Se-

perti aksi-aksi unjuk rasa sebelumnya (Situbondo, Tasikmalaya, Re-ngasdengklok), walaupun menimbulkan korban (materi dan jiwa) masih bersifat sporadis (terpencar-pencar dan sewaktu-waktu), tidak terpolo, apalagi terkoordinasi. Kalau pun ada yang mengkoordinasikan atau memanfaatkan (oleh pejabat sering disebut : penunggang) gerakan-gerakan massa tersebut, maka sifatnya hanya lokal, tidak nasional.

Karena sifatnya yang lokal tersebut acapkali gerakan-gerakan massa itu mudah diduga, sehingga masyarakat bisa berjaga-jaga (menghindari daerah-daerah tertentu, tidak keluar rumah pada hari-hari atau jam-jam tertentu atau menutup toko-toko).

Tetapi dengan hancurnya sistem perekonomian Indonesia gara-gara dihantam oleh krisis moneter (yang awalnya berasal dari luar negeri), maka sistem politikpun mulai goyah. Pada gilirannya, aksi-aksi massa anti tirani yang mula-mula sporadis itu mulai menemukan titik temu. Melalui gerakan-gerakan mahasiswa di kampus-kampus utama, yang ditopang oleh dosennya, aksi-aksi massa sedikit demi sedikit mulai terarah dan terorganisasikan. Temanya adalah aksi-aksi damai di dalam kampus, sasarannya adalah menurunkan Soeharto dari jabatan presiden, sedangkan slogan-nya adalah : "Reformasi".

Pada masa-masa itu tugas Polri

relatif masih mudah, karena semua sumber daya dan kekuatan hanya perlu difokuskan ke sekitar kampus. Jikapun terjadi ekses, sifatnya hanya lokal (petugas yang over acting karena jenuh dan lelah, atau mahasiswa demonstran yang kehilangan kendali karena tidak sabar sehingga menyebabkan benturan fisik di lapangan).

Setelah kasus Trisakti (12 Mei 1998), terjadi perubahan yang sangat drastis dalam pola huru-hara. Kasus itu, yang diikuti oleh kerusuhan 13-14 Mei 1998, telah mempercepat proses jatuhnya presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998, akan tetapi sejak itu perilaku agresif massa yang tadinya dimotivasi oleh semangat anti-tirani, mendadak sontak berubah menjadi anarki.

Massa yang anarkis berperilaku kejam, sadis, tanpa aturan, tanpa arah dan tanpa sasaran yang jelas, semua orang berperilaku semaunya sendiri, tidak peduli pada kepentingan orang lain: menjarah, merampok, merusak, membakar, menyakiti orang lain, memperkosa, membunuh. Bahkan kadang-kadang tidak ingat pada kepentingan dirinya sendiri (merusak pabrik tempat kerjanya sendiri, sementara dia sendiri menjarah di tempat lain, warungnya sendiri dijarah orang lain).

Anarki ini bisa terjadi karena mendadak sontak semua aturan dan hukum yang berlaku (termasuk penegak hukumnya) kehilangan nilainya

sehingga tidak dipedulikan lagi sama sekali. Dengan perkataan lain, masyarakat tiba-tiba kehilangan aturan dan anutan, sehingga semua orang bisa bertindak semaunya sendiri.

Dalam keadaan ini, tugas Polri sebagai pengendali huru-hara menjadi jauh lebih berat. Perilaku massa jauh lebih tidak terkendali, tidak teramalkan, bisa terjadi di mana saja (tidak hanya di Jakarta dan Jawa, tetapi juga di Irian, Timor-Timur, Maluku Utara dsb.), kapan saja, oleh siapa saja (pensiunan ABRI yang digusur dari permukimannya, pramugari yang di-PHK, petani bekas penggarap lapangan golf dsb.) dan isu apa saja (mulai dari menuntut penurunan harga sembako, turunnya pejabat atau anggota DPR yang KKN, sampai dengan menuntut referendum di Timtim atau kemerdekaan di Irija).

Perubahan pola aksi massa dari anti-tirani ke anarki ini terjadi dalam tempo yang sangat cepat. Kecepatan perubahan ini tidak sesuai dengan proses alamiah yang biasanya memakan waktu yang cukup lama. Karena itu, dari sudut ilmu psikologi massa, patut diduga bahwa ada rekayasa untuk merubah pola aksi massa ini secara cepat.

Dugaan akan adanya rekayasa itu diperkuat dengan adanya berbagai laporan di berbagai media massa dan internet serta pandangan mata para saksi tentang adanya kelompok-kelompok tertentu yang secara sistematis memulai perusakan, penjarah-

an dan pembakaran di berbagai lokasi di Jakarta dan setelah massa masyarakat terpancing dan ikut serta menjarah, maka kelompok-kelompok ini dengan cepat meninggalkan lokasi yang bersangkutan untuk menuju sasaran berikutnya.

Sementara itu, Polri sendiri makin sulit melaksanakan tugasnya, karena ia adalah bagian dari hukum, yang oleh massa yang anarkis justru tidak diperdulikan lagi.

Kesulitan Polri masih ditambah lagi oleh statusnya sebagai bagian dari ABRI. Perannya sebagai penegak hukum dan pengayom masyarakat sering harus berbenturan dengan fungsinya sebagai ABRI yang lebih mendasarkan pada komando (Saptamarga ke lima). Berbagai keputusan operasional maupun pembinaan tergantung pada kebijakan Mabes ABRI, sehingga Polri terkendala untuk mengembangkan dirinya sendiri. Fungsi sopsol dan hankam dari ABRI pun (fungsi teritorial) tidak jarang harus dilawankan dengan fungsi bimmas Polri.

Tidak mengherankan jika dalam tubuh Polri sendiri timbul ketidak-

puasan tentang status Polri yang tidak otonom ini. Pada gilirannya tidak mengherankan jika Polri tidak dapat menjalankan tugasnya dengan optimal.

Dari uraian tersebut di atas, jelaslah bahwa Polri memerlukan kemampuan analisis yang lebih makro untuk menilai situasi mikro dan selanjutnya mengambil tindakan-tindakan yang tepat untuk mengantisipasi (mengambil tindakan preventif) maupun mengatasi (tindakan represif) kejadian-kejadian yang timbul di lapangan.

Analisis atau kajian-kajian yang mendalam mengenai masalah-masalah makro yang terjadi mulai dari tingkat pusat sampai tingkat Polsek harus terus-menerus dilakukan berdasarkan masukan-masukan akurat dari laporan intelijens maupun dari berbagai sumber lainnya (instansi terkait, pakar, masyarakat) untuk selanjutnya dituangkan dalam perintah-perintah teknis operasional (yang terus-menerus disesuaikan) kepada para komandan dan kepala polisi di lapangan.